UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bakker, Anto, 1986, *Metode – Metode Filsafat,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary* (6th Edition), West Publishing Co, Chicago.

Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif,* Airlangga Press, Surabaya.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim 2016, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Friedman, P. Jack, 1987, *Dictionary of Business Terms,* Barron's Educationa Series Inc, USA.

Fuady, Munir, 2002, *Doktrin – Doktrin Modern dalam Coorporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan : Rapat – Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunadi, 2001, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk & Pemajakannya*, Salemba Empat, Jakarta

Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang dan Benny Pontoh, 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.

Meolong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nazir, Moh., 2003, *Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia*, Bogor.

Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,* Alumni, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, CV Mandar Maju, Bandung.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Poerwadarminta, W. J. S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Puang, Victorianus M.H. Randa, 2011, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Jakarta.

Sastrawidjaya, Man. S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Alumni, Bandung.

Sawir, Agnes 2004, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Setiyowati, Juanita Eko, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu*, Alumni, Jakarta

Sembiring, Hermansyah, dan Sarno Amsali, 2002, *Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Swasta Melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Sinaga, Syamsudin Manan, 2004, *Hukum Kepailitan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----------, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta

Sitepu, Runtung, 2004, *Diktat Perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum*, Pasca Sarja Fakultas Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.

----------, 2010, *Hukum Kepailitan Memhami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

----------, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soebekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian,* Citra Raya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2014, *Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Cetakan ke – 4), Kencana, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda Karya, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surowidjojo, Arief T., 2005, *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lakakaiya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Suryono, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suyudi, Aria, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Jakarta.

Wijayanta, Tata 2016, *Undang – Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuhhasarie, Emmie, 2003, *Perjanjian-perjanjian dalam Rangka Restrukturisasi: Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

C. Jurnal

Afriana, Anita dan Rai Mantili, 2017, "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal,* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 219-233.

Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto, 2003, "Implementasi Good Coorporate Governance dalam Menyikapi Bentuk – Bentuk Penyimpangan Fiduciaiy Duty Direksi dan Komisaris Perseroan", *Jurnal Hukum Bisnis Vol 22*, Universitas Padjajaran, Bandung. hlm.1-35.

Haq, M. Bagas Amiru dan Tata Wijayanta, Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea, *International Journal of Innovation*, Volume 14, Issue 12, hlm. 715-729.

Nugroho, Lucky Dafira, 2017, "Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Debitor Pailit", *Jurnal,* Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. hlm. 245-266.

Rahmadiyanti, Rindy Ayu, 2015, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Notarius* Edisi 08 Nomor 2, Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 252-273.

S, Ellyana, 1998, "Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran", *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya Undang – Undang Kepailitan, Jakarta.

Sunarmi, 2004, "Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surjanto, Diana, 2018, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 2,* Universitas Udayana, Bali. hlm. 258-268.

Wijayanta, Tata, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 216-226.

_____, 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal,* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1-13.

Zulhadi, Adhani Rachmi dan Parulian Paidi, "Analisis Yuridis Kedudukan Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm. 1-22.

D. Karya Ilmiah

Alfaris, Salman, 2021, Aspek Hukum Penolakan Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Damanik, Sehat, 2008, Insolvency Test Dalam Proses Kepailitan, *Tesis,* Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Harahap, Yuanita, 2008, Analisis Hukum Mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang-Undang Kepailitan, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kartika, 2009, Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V. Melawan PT Argo Pantes, Tbk Dalam Perkara Kepailitan, *Tesis* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 119/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG
AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

F. Internet

"Fitri N. Heriani, Enam Kesalahan UU Kepailitan", http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt561737ed1a1cb/enamkesalahan-uu-kepailitan, diakses tanggal 14 Juli 2021 pukul 17.02 WIB.

"Letezia Tobing, Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c3529a6061f/hukum-dagang/, diakses pada 30 November 2020 pukul 01.00 WIB

"Tumbuan, Fred B.G., Terobosan Besar Undang – Undang Kepailitan Ada di PKPU", https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11346/fred-bg-tumbuan-terobosan-besar-undang undang-kepailitan-ada-di-pkpu/, diakses pada 30 November 2020 pukul 01.00 WIB

"Hadi Subhan, Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan/, 31 Mei 2021 pukul 23.00 WIB

"Rikardo Simanjuntak, Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan/, 31 Mei 2021 pukul 23.00 WIB

G. Wawancara

Indrabayu, Irfan, 2021, Alasan PT ADS Wajib Insolven, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 2 Juni.

_____, 2021, Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 2 Juni.

Prasetyo, Budhi, 2021, Alasan PT ADS Wajib Insolven, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 2 Juni.

Purba, Jamaslin James, 2021, Tidak Perlu Memberikan Rencana Perdamaian Kembali Kepada Debitor dalam Kepailitan, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 5 Juli.

Setyowibowo, Dwi Laksono, 2021, Tidak Perlu Memberikan Rencana Perdamaian Kembali Kepada Debitor dalam Kepailitan, *Wawancara*, Jakarta Pusat, 2 Juni.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TENTANG AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT PERDAMAIAN DITINJAU DARI PASAL 281 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. MDN. DAN PUTUSAN NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. NIAGA.JKT.PST)
NASKEL THIOPULUS B, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2021, Alasan PT Good Luck Resort Pailit, *Wawancara*, 8 Juli.